

**PENGARUH MOTIVASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL DENGAN VARIABEL KONTROL GENDER DAN USIA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Umi Zulma Nurroifah**

**NPM: 4320600035**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

# SKRIPSI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2019

**PENGARUH MOTIVASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL DENGAN VARIABEL KONTROL GENDER DAN USIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Umi Zulma Nurroifah**

**NPM: 4320600035**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

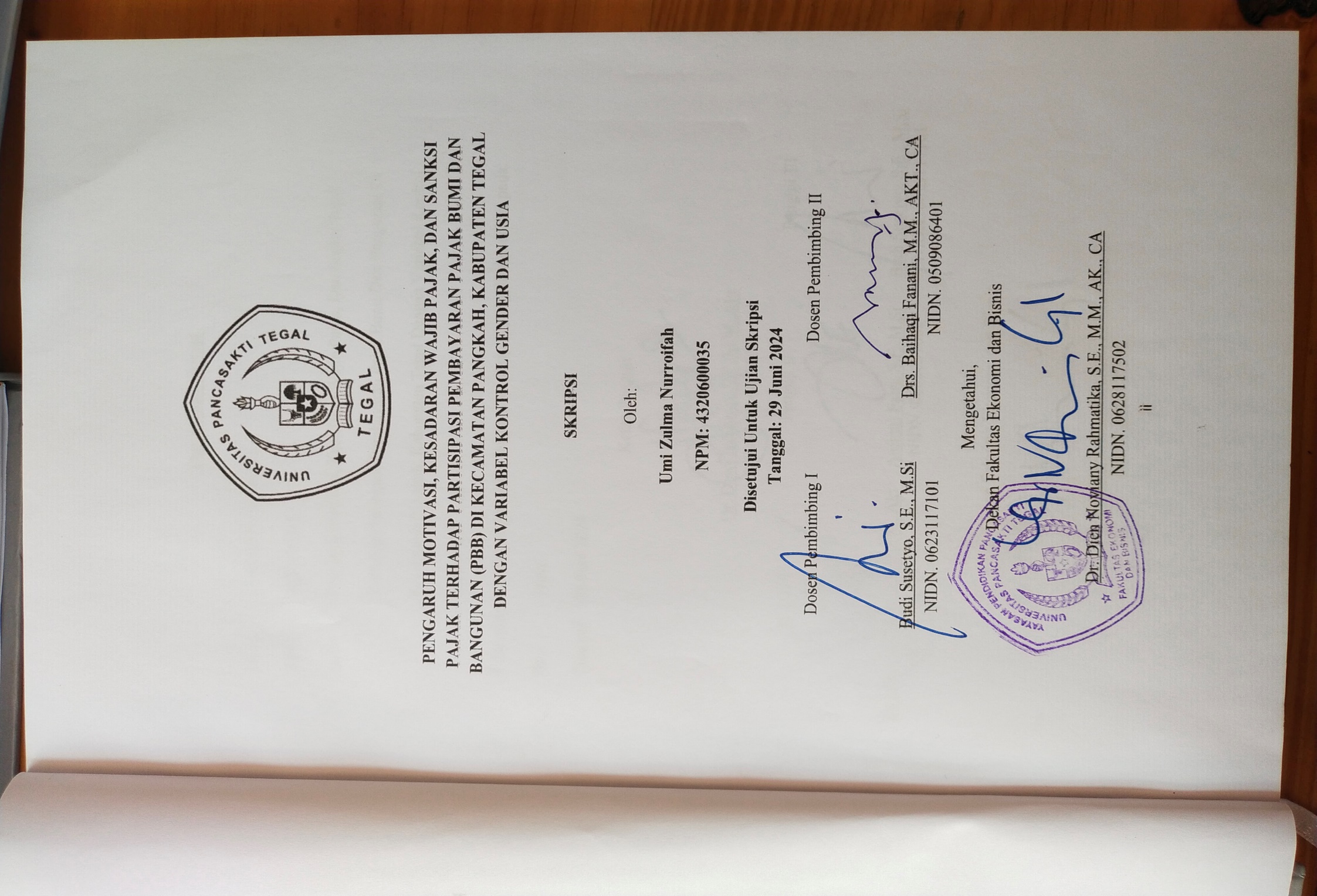
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

# **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**



****

**PENGARUH MOTIVASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL DENGAN VARIABEL KONTROL GENDER DAN USIA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Umi Zulma Nurroifah**

**NPM: 4320600035**

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

**Tanggal: 29 Juni 2024**

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Budi Susetyo, S.E., M.Si Drs. Baihaqi Fanani, M.M., AKT., CA

NIDN. 0623117101 NIDN. 0509086401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

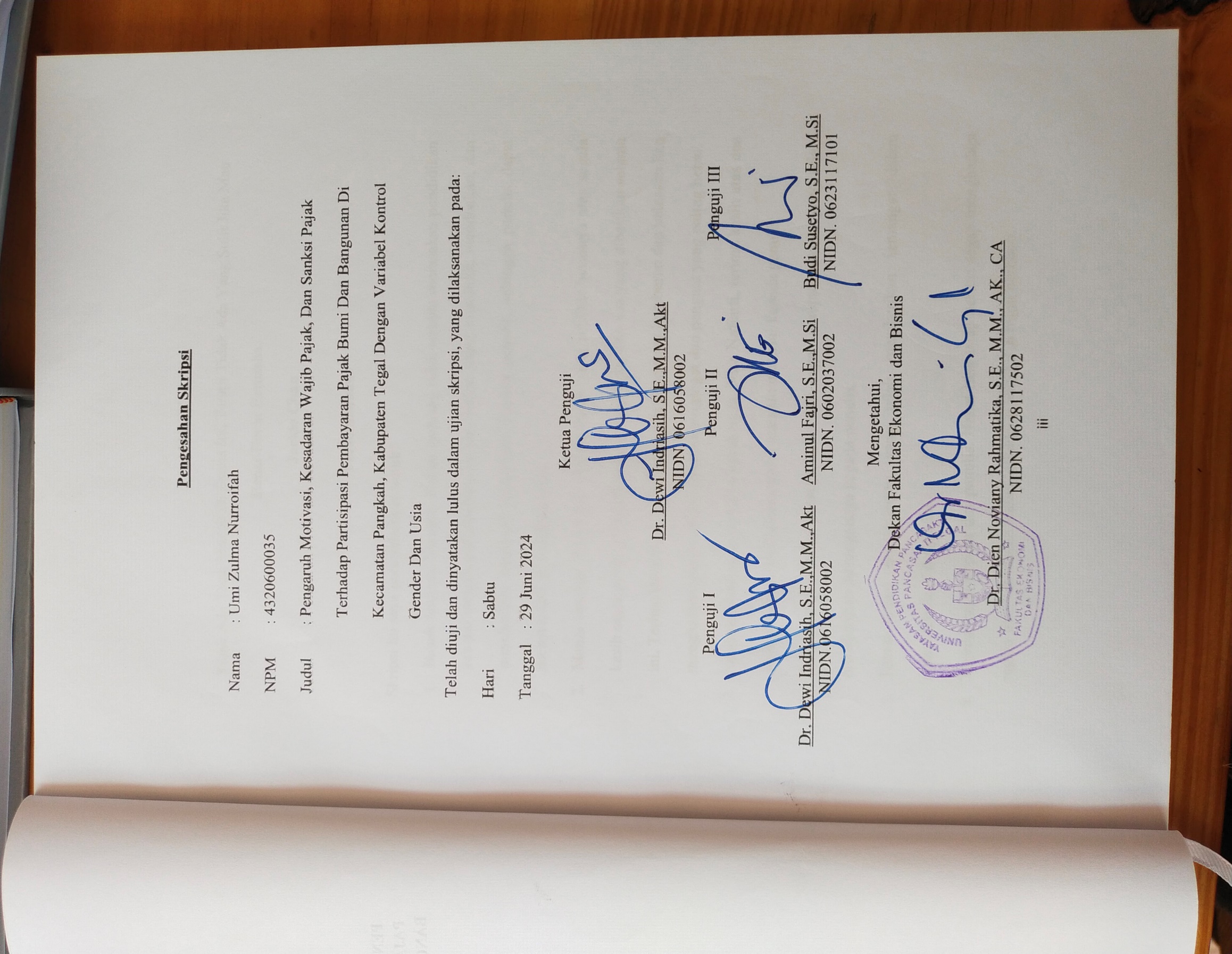
Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., AK., CA

NIDN. 0628117502

**Pengesahan Skripsi**

# **HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI**

Nama : Umi Zulma Nurroifah

NPM : 4320600035

Judul : Pengaruh Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak

Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di

Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Dengan Variabel Kontrol Gender Dan Usia

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2024

Ketua Penguji

Dr. Dewi Indriasih, S.E.,M.M.,Akt

NIDN. 0616058002

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penguji I  Dr. Dewi Indriasih, S.E.,M.M.,Akt  NIDN.0616058002 | Penguji II  Aminul Fajri, S.E.,M.Si  NIDN. 0602037002 | Penguji III  Budi Susetyo, S.E., M.Si  NIDN. 0623117101 |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., AK., CA

NIDN. 0628117502

**MOTTO**

Tidak Ada Yang Mudah Di Dunia Ini, Tetapi Tidak Ada Yang Sulit Jika Mau Benar-Benar Berusaha.

**Jackie Chan**

**Persembahan:**

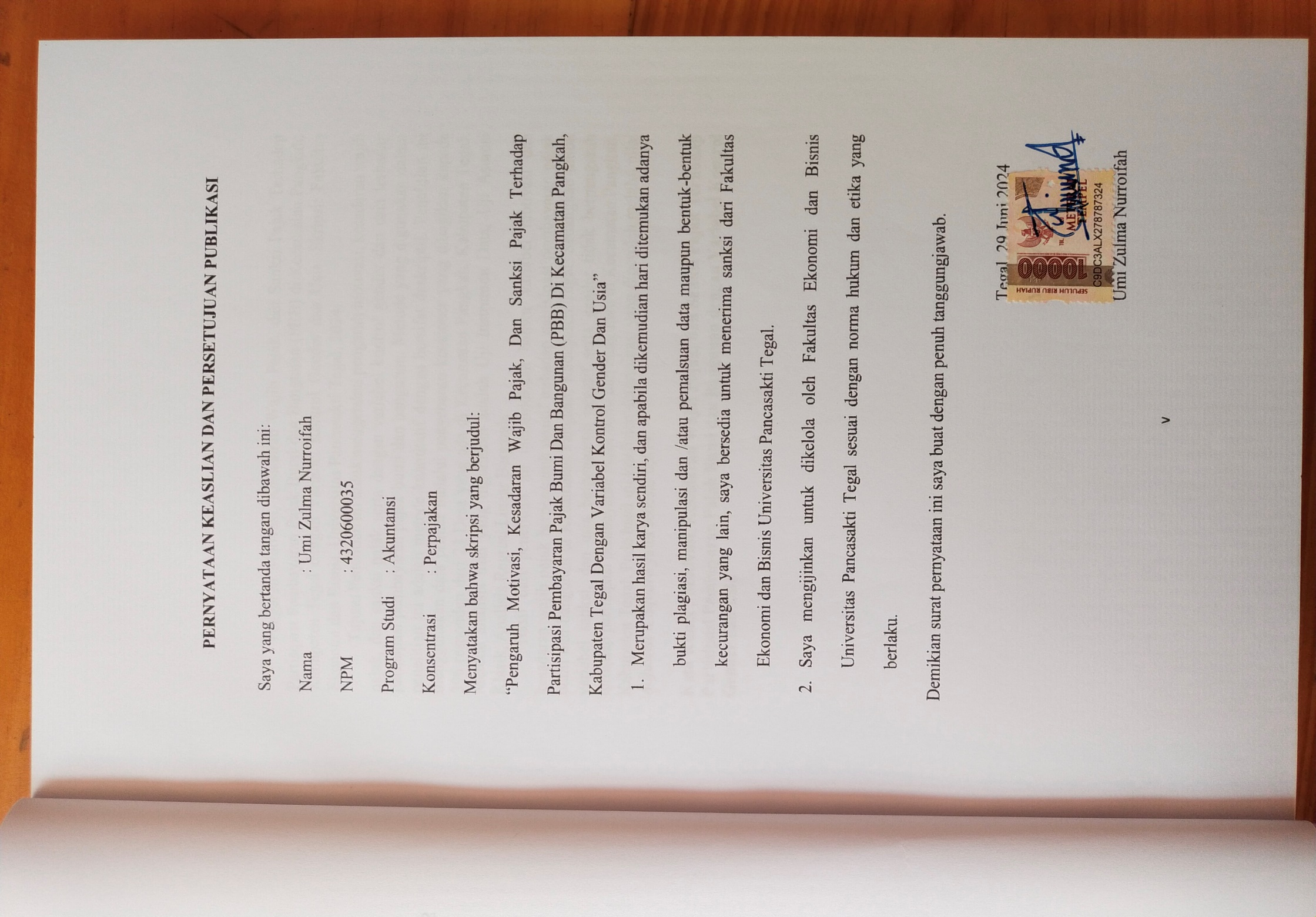
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak tercinta, Nuraziz. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namum beliau dapat mendidik, mendoakan, dan mmeberikan semangat tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
2. Mama tercinta, Masruroh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayangnya, dukungannya, semangatnya, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan serta kesabaran dan keluasan hati menghadapi penulis. Mama adalah pengingat dan penguat yang paling hebat.
3. Saudara kandung saya yaitu kakak saya, Nisa Nafiarti, terima kasih atas doa serta dukungan baik secara moril maupun material kepada penulis.
4. Terima kasih untuk keluarga besar dari bapak maupun mama, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku kehidupan walau terkadang jenuh dan ingin berhenti.

# **PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Zulma Nurroifah

****NPM : 4320600035

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Dengan Variabel Kontrol Gender Dan Usia”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 29 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Umi Zulma Nurroifah

# **ABSTRAK**

Pengaruh Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dengan Variabel Kontrol Gender dan Usia. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak serta dengan variabel kontrol gender dan usia terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran keusioner yang dibagikan kepada 396 responden dari 23 Desa yang ada di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk variabel sanksi, dan usia berpengaruh negatif serta gender tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Pada hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh melalui nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,679.

**Kata Kunci : Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Kontrol Gender dan Usia**

**ABSTRACT**

The Influence of Motivation, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Participation in Payment of Land and Building Tax (PBB) in Pangkah District, Tegal Regency with Gender and Age Control Variables. Thesis: Faculty of Economics and Business, Pancasakti University Tegal, 2024.

The aim of this research is to determine the influence of motivation, taxpayer awareness, and tax sanctions as well as the control variables gender and age on participation in paying land and building taxes. The method used in this research is a quantitative method with a descriptive nature. This research uses primary data by distributing questionnaires which were distributed to 396 respondents from 23 villages in Pangkah District, Tegal Regency. The data analysis methods used are Data Instrument Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this research show that the motivation and awareness variables of taxpayers have a positive effect on participation in paying land and building taxes in Pangkah District, Tegal Regency. Meanwhile, for the sanctions variable, age and age have a negative effect and gender has no effect on participation in paying land and building taxes in Pangkah District, Tegal Regency. In the test results, the coefficient of determination obtained through the Adjusted R Square value is 0.679.

**Keywords: Motivation, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions for Participation in Payment of Land and Building Taxes with Gender and Age Control Variables**

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan judul Pengaruh Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dengan Variabel Kontrol Gender dan Usia. Meskipun banyak hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaannya, tatapi dapat berhasil menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari bebagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., AK, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal;
2. Bapak Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., AK., CA. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal;
3. Bapak Budi Susetyo, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Akt., CA, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang telah berjasa membantu bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal;
6. Kepada kedua orang tua, dan kakak saya yang telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan serta memberikan semangat untuk terus berusaha dan jangan mudah menyerah;
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi untuk tetap semangat dan terus berusaha.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 29 Juni 2024

Umi Zulma Nurroifah

# **DAFTAR ISI**

**Halaman**

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc171149215)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc171149216)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iii](#_Toc171149217)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc171149218)

[HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc171149219)

[ABSTRAK vi](#_Toc171149220)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc171149221)

[DAFTAR ISI x](#_Toc171149222)

[DAFTAR TABEL xiv](#_Toc171149223)

[DAFTAR GAMBAR xvi](#_Toc171149224)

[DAFTAR LAMPIRAN xvii](#_Toc171149225)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc171149226)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc171149227)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc171149228)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc171149229)

[D. Manfaat Penelitian 10](#_Toc171149230)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc171149231)

[A. Landasan Teori 12](#_Toc171149232)

[1. Teori Atribusi 12](#_Toc171149233)

[2. Perpajakan 14](#_Toc171149234)

[3. Pajak Bumi dan Bangunan 17](#_Toc171149235)

[4. Partisipasi 22](#_Toc171149236)

[5. Motivasi 27](#_Toc171149237)

[6. Kesadaran Wajib Pajak 32](#_Toc171149238)

[7. Sanksi Pajak 35](#_Toc171149239)

[B. Studi Penelitian Terdahulu 38](#_Toc171149240)

[C. Kerangka Pemikiran 48](#_Toc171149241)

[D. Hipotesis 50](#_Toc171149242)

[BAB III METODE PENELITIAN 52](#_Toc171149243)

[A. Jenis Penelitian 52](#_Toc171149244)

[B. Populasi dan Sampel 52](#_Toc171149245)

[1. Populasi 52](#_Toc171149246)

[2. Sampel 53](#_Toc171149247)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 54](#_Toc171149248)

[1. Definisi Konseptual 54](#_Toc171149249)

[2. Operasional Variabel 55](#_Toc171149250)

[D. Metode Pengumpulan Data 59](#_Toc171149251)

[E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 60](#_Toc171149252)

[1. Uji Validitas 60](#_Toc171149253)

[2. Uji Reliabilitas 60](#_Toc171149254)

[F. Metode Analisis Data 61](#_Toc171149255)

[1. Statistik Deskriptif 61](#_Toc171149256)

[2. Uji Asumsi Klasik 61](#_Toc171149257)

[3. Analisis Regresi Linear Berganda 63](#_Toc171149258)

[4. Uji Hipotesis 64](#_Toc171149259)

[5. Koefisien Determinasi (R2) 65](#_Toc171149260)

[BAB IV HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66](#_Toc171149261)

[A. Gambaran Umum 66](#_Toc171149262)

[1. Deskripsi Umum Kecamatan Pangkah Dengan Keadaan Geografis 66](#_Toc171149263)

[2. Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 67](#_Toc171149264)

[B. Hasil Penelitian 68](#_Toc171149265)

[1. Deskripsi Data 68](#_Toc171149266)

[2. Karakteristik Responden 68](#_Toc171149267)

[3. Uji Validitas dan Reliabilitas 73](#_Toc171149268)

[4. Metode Analisis Data 77](#_Toc171149269)

[5. Uji Asumsi Klasik 78](#_Toc171149270)

[6. Analisis Regresi Linear Berganda 82](#_Toc171149271)

[7. Uji Hipotesis 84](#_Toc171149272)

[8. Koefisien Determinasi (R2) 88](#_Toc171149273)

[C. Pembahasan 89](#_Toc171149274)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96](#_Toc171149275)

[A. Kesimpulan 96](#_Toc171149276)

[B. Saran 97](#_Toc171149277)

[DAFTAR PUSTAKA 99](#_Toc171149278)

LAMPIRAN

# **DAFTAR TABEL**

**Halaman**

[Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2023 4](#_Toc170916596)

[Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu 44](#_Toc170916597)

[Tabel 3.1 Operasional Variabel 57](#_Toc170916598)

[Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian 68](#_Toc170916604)

[Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Setiap Desa 69](#_Toc170916605)

[Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 70](#_Toc170916606)

[Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 71](#_Toc170916607)

[Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 71](#_Toc170916608)

[Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 72](#_Toc170916609)

[Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Motivasi (X1) 73](#_Toc170916610)

[Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2) 74](#_Toc170916611)

[Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3) 74](#_Toc170916612)

[Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Partisipasi Pembayaran PBB (Y) 75](#_Toc170916613)

[Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 76](#_Toc170916614)

[Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik Deskriptif 77](#_Toc170916615)

[Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data 79](#_Toc170916616)

[Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas Setelah Transform Data 80](#_Toc170916617)

[Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolonieritas 81](#_Toc170916618)

[Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 82](#_Toc170916619)

[Tabel 4.17 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 83](#_Toc170916620)

[Tabel 4.18 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 85](#_Toc170916621)

[Tabel 4.19 Hasil Uji Persial (Uji t) 86](#_Toc170916622)

[Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 88](#_Toc170916623)

# **DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

[Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 50](#_Toc168429383)

[Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah Kebupaten Tegal 67](#_Toc168429389)

# **DAFTAR LAMPIRAN**

**Halaman**

[Lampiran 1Data Ketetapan dan Realisasi PBB di Kecamatan Pangkah 104](#_Toc170967687)

[Lampiran 2 Kuesioner Penelitian: 105](#_Toc170967688)

[Lampiran 3 Jawaban kuesioner variabel motivasi (X1) 110](#_Toc170967689)

[Lampiran 4 Jawaban kuesioner variabel kesadaran wajib pajak (X2) 121](#_Toc170967690)

[Lampiran 5 Jawaban kuesioner variabel sanksi pajak (X3) 132](#_Toc170967691)

[Lampiran 6 Jawaban kuesioner variabel partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (Y) 143](#_Toc170967692)

[Lampiran 7 Hasil deskripsi data responden 154](#_Toc170967693)

[Lampiran 8 Hasil uji validitas 156](#_Toc170967694)

[Lampiran 9 Hasil Uji Reliabilitas 160](#_Toc170967695)

[Lampiran 10 Hasil Uji Metode Analisis Data 161](#_Toc170967696)

[Lampiran 11 Surat Izin Penelitian 164](#_Toc170967697)

[Lampiran 12 Surat Pengantar Izin Penelitian untuk ke setiap Desa yang ada di Kecamatan Pangkah 165](#_Toc170967698)

[Lampiran 13 Dokumentasi Pembagian Kuesioner 166](#_Toc170967699)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Indonesia tanpa henti mendorong serta melaksanakan perkembangan diberbagai sektor, hal tersebut mampu mengoptimalkan adanya pertumbuhan ekonomi, dan pastinya untuk melakukan pembangunan membutuhkan dana dengan jumlah cukup besar. Sektor yang dapat menyumbangkan pendapatan atau memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan yaitu perpajakan. Pada sektor perpajakan dapat menopang yang kaitannya dengan pembangunan di Indonesia lebih dari 50% dibandingkan bidang lainnya, namun angka tersebut dapat berubah tergantung pada perkembangan ekonomi serta kebijakan fiskalnya. Pajak dapat dinyatakan sebagai sumber pendapatan guna pemerintah yang diperoleh dari warga negara atau entitas bisnis untuk membiayai kebutuhan dan program publik. Tingginya pada tingkat pembayaran pajak itu akan membantu pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya seperti melakukan pembangunan dan juga dapat mengurangi pemerintah dalam masalah utang pada luar negeri (Waang, 2023).

Pajak juga dapat dipahami dengan kewajiban finansial yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya berdasarkan peraturan hukum, pajak juga digunakan dengan maksud mendanai beraneka program dan layanan pemerintah contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pajak terdiri dengan 2 jenis meliputi pajak negara,

dan pajak daerah. Pemungutan dan pengelolaan pajak pusat dijalankan oleh pemerintahan pusat, sementara pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian diberikan kepada kepala wilayah yaitu pemerintah kecamatan dengan melibatkan seluruh perangkat yang berada dibawahnya seperti perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak terebut. Berikut yang merupakan pajak deraeh yaitu “pajak bumi dan bangunan dengan wewenangnya dialihkan dengan wilayah yang bersangkutan” (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pajak bumi dan bangunan dijelaskan jenis pajak dengan ditanggung atas hak milik tanah serta banguannya di wilayah tersebut, dengan besaran PBB dapat bervariasi tergantung pada nilai properti dan kebijakan pemerintah setempat. Bumi yaitu merujuk pada tanah yang dimiliki, baik oleh individu, maupun perusahaan, sedangkan bangunan yaitu merujuk pada struktur fisik seperti rumah, gedung, atau bangunan lainnya. PBB dihitung berdasarkan NJOP yang diputuskan melalui pemerintahan daerah (Amelia et al., 2023). Adapun dasar hukum PBB yaitu berlandaskan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, mengenai pajak yang dapat dijelaskan dengan sumbangan wajib terhadap daerah dimana seseorang yang sudah berkewajiban membayar pajak ataupun organisasi yang sifatnya memaksa dengan ketentuan peraturan perpajakan tersebut tidak dengan menerima balasan atau penggantian langsung dan pajak tersebut dipergunakan guna kebutuhan pemerintah daerah demi keamanan atau kenyamanan masyarakat, serta dilakukannya pembangunan di daerah masing-masing, sehingga pajak ini diakui menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Eprianti & Indarti, 2020).

Pada pembayaran pajak diperlukan adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajaknya, khususnya pada pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah daerah sangat diperlukan, karena didalam menaikkan perolehan pajaknya perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat telah berpartisipasi secara penuh dalam pembayaran pajak maka penerimaan pajak dapat berjalan efektif dan segala program pemerintah termasuk dalam pembangunan daerah masing-masing dapat terlaksanakan (Agustin & Mustoffa, 2023). Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan kontribusi keuangan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada pemerintah untuk mendukung pengelolaan negara dan penyediaan layanan publik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi untuk membayar pajaknya adalah terdapat tingkat keadilan dalam sistem pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat pemahaman tentang manfaat yang diterima dari pajak yang dibayarkan. Partisipasi yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (Sasmahera et al., 2021).

Saat ini pemerintah Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Pangkah telah mengupayakan kenaikan penerimaan PBB, karena menyadari bahwa PBB termasuk sebagian dari sumber pendapatan daerah. Permasalahan yang terjadi merupakan dari partisipasi setiap wajib pajak untuk dapat menyempurnakan kewajibannya membayarkan pajaknya, sehingga masalah itu dapat dilihat dari realisasi pendapatan PBB di Kecamatan Pangkah hal itu memperlihatkan derajat partisipasi yang masih rendah. Di Kecamatan Pangkah setiap tahun selalu menentukan pencapaian dalam penerimaan pajaknya, akan tetapi hal tersebut tidak setiap saat sempurna dalam realisasinya. Dibawah ini merupakan tabel realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pangkah pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PBB Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Ketetapan** | **Realisasi** | | **Sisa** |
| **Pajak** | **%** |
| 1. | 2019 | 2.690.073.637 | 2.453.480.943 | 91.2 | 236.592.694 |
| 2. | 2020 | 3.212.309.542 | 2.858.010.408 | 88.97 | 354.299.134 |
| 3. | 2021 | 3.552.371.051 | 3.187.710.361 | 89.73 | 364.660.690 |
| 4. | 2022 | 3.637.213.739 | 3.170.553.350 | 87.17 | 466.660.389 |
| 5. | 2023 | 3.998.789.170 | 3.066.474.183 | 76.69 | 932.314.987 |

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Tegal

Berdasarkan tabel tersebut, memperlihatkan bahwa pencapaian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pangkah sejauh ini masih tidak memenuhi targetnya. Pada setiap tahunnya sering mengalami penurunan dapat dilihat dari presentase di tahun 2019 sebesar 91,2% mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 88,97% terjadi lagi penurunan pada tahun 2021 sebesar 89,73% serta di tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 87,17% akan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan lagi sebesar 76,69%.

Terjadi penurunan penerimaan pajak dapat dikatakan dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak yang dibilang masih rendah atau menurunnya kesadaran masyarakat dengan menganggap remeh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pada perihal partisipasi dimungkinkan masih ada masyarakat yang kurang peka terhadap pembayaran pajaknya. Hal tersebut akan menjadi fokus pemerintah khususnya di Kecamatan Pangkah, karena penerimaan pajak ini mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sebagai pemerintah daerah dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajaknya perlu adanya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.

Pada pengetahuan perpajakan perlu juga adanya pemahaman pada penyetoran pajak bumi dan bangunan yang mempunyai berbagai fungsi penting yaitu sebagai sumber pendapatan atau pendanaan pemerintah daerah, untuk mendukung aspek pembangunan demi kesejahteraan masyarakat seperti penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan lokal seperti pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan sejenisnya (Langi et al., 2020). Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap kewajibannya dalam pembayaran pajaknya, meskipun kebanyakan masyarakat di Indonesia yang acuh terhadap pajak karena berangapan bahwa kurangnya transparan pemerintah terhadap pengelolaan anggaran penerimaan PBB serta sedang marak-maraknya kejadian kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat sehingga membuat masyarakat enggan membayarkan pajaknya karena masyarakat merasa belum merasakan adanya kesejahteraan dari hasil penerimaan pajak bumi dan banguan tersebut (Sasmahera et al., 2021).

Aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak salah satunya adanya motivasi yang merupakan kekukatan atau dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, atau melakukan sesuatu yang termasuk dalam faktor psikologis untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan individu. Masyarakat dituntut supaya menanamkan motivasi dalam dirinya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dalam membayarkan pajaknya (Supriatna, 2022). Dalam hal motivasi masyarakat untuk membayar pajaknya tidak mampu dipraktikkan oleh masyarakat saja, dan tentunya harus adanya tindakan dari pemerintah dengan adanya pembangunan infrastruktur serta memberikan bantuan sosial secara merata, dengan begitu akan timbul rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menumbuhkan tingkat motivasi masyarakat untuk membayar pajak, serta sangat dibutuhkan kerja sama serta komunikasi yang baik antara masyarakat bersama pemerintah di Wilayah masing-masing agar masyarakat tersebut dapat menaati dan melakukan kewajiban, sedangkan pada pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kepada WP dengan baik agar timbul rasa keyakinan dari masyarakat sendiri (Fauzi & Kismadani, 2019).

Pada dasarnya faktor penghambat pembayaran pajak suatu hal yang meresahkan wajib pajak adalah permasalahan pada tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang dengan perlu diinformasikan bahwa pajak bukan hanya menjadi kewajiban pada warga negara Indonesia namun juga menjadi hak setiap orang atau komunitas, kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitasnya. Kesadaran perpajakan mempunyai konsekuensi logis bagi orang yang terkena pajak sendiri, khususnya kemauan seseorang untuk berkontribusi membayarkan pajaknya tersebut. Kesadaran wajib pajak adalah termasuk pada kemampuan dan kewajiban dalam perpajakan untuk mengakui dan mematuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Kesadaran ini penting demi menjaga keseimbangan sistem perpajakan dan mendukung fungsi negara dalam meyediakan layanan publik (Sasmahera et al., 2021).

Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan dengan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengakui, menghargai, menaati dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan berakibat dalam lambatnya proses pembangunan, maka dari itu dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hilminawati & Napisah, 2023).

Masalah terjadinya penghambat pada penerimaan pajak juga ada didalam penunggakan pembayaran pajak yang terjadi secara terus-menerus tetapi belum adanya sanksi tegas bagi wajib pajak yang enggan membayarkan pajaknya. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, salah satunya ada sanksi pajak mempunyai peranan yang esensial untuk memberi pembelajaran bagi pembuat pelanggaran baik sengaja maupun karena alpa agar tidak meremehkan dalam membayarkan pajaknya. Sanksi pajak merupakan konsekuensi maupun denda yang diberlakukan atas pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan, pelanggaran tersebut dapat berupa kurang bayar, lupa membayarnya, tidak melaporkan pajak (Romdhoni et al., 2023).

Sanksi pajak juga termasuk denda keterlambatan pembayaran, pengenaan bunga atas tunggakan, denda administratif, hingga sanksi pidana dalam kasus pelanggaran serius. Pada umumnya sanksi perpajakan ini timbul dari wajib pajak itu sendiri, baik dari perseorangan maupun badan hukum, yang sudah melanggrar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dipengaruhi oleh tingkat kesengajaan pelanggaran dan lama keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Setiap negara memiliki aturan sendiri dalam sektor perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, karena sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tersebut tidak dilanggar. Tujuan adanya sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhann atau ketaatan terhadap aturan perpajakan, dan menjaga keseimbangan sistem perpajakan (Waang, 2023).

Dalam penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Sasmahera et al., (2021), perihal “pengaruh kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, sanksi, dan sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Dengan beberapa penjelasan maka dapat ditarik hasil hipotesisnya serta kesimpulannya bahwa “Variabel sikap berpengaruh secara persial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel lainnya yaitu kesadaran, Pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, dan sanksi tidak berpengaruh secara persial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan”.

Penelitian ini termasuk pengembangan dari yang dikerjakan Sasmahera et al., (2021), perbedaannya tersebut terletak pada variabel, tahun penelitian dan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua variabel yaitu pada variabel kesadaran dan sanksi, serta penulis juga menambahkan satu variabel yaitu motivasi. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2023, dan objek pada penelitian ini yaitu pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Dalam hal ini melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Motivasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Dengan Variabel Kontrol Gender Dan Usia”**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah adanya motivasi berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Apakah adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
3. Apakah dengan adanya sanksi pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang hendak penulis capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap partisipaasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman konsep-konsep perpajakan, seperti kebijakan perpajakan, sistem perpajakan dan teori perpajakan, serta memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai motivasi, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta peartisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan membandingkan antara teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dengan kondisi yang tejadi sebenarnya di lapangan.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat memahami, baik mengenai sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya. Selain itu hasil dari penelitian ini digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, serta diharapkan dapat memperbaiki lagi tingkat pasrtisipasi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajak.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah Kecamatan Pangkah dan Bappenda Kabupaten Tegal agar dapat memperhatikan lagi dalam menangani perihal kepatuhan wajib pajak serta dapat meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak.

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

1. Landasan Teori

Penelitian ini terdapat adanya teori yang dapat mendukung dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori dengan cara apa kita dapat membuat keputusan mengenai perilaku seseorang, teori ini mengartikan proses bagaimana kita dapat memastikan apa penyebabnya dan motif yang berhubungan dengan perilaku seseorang tersebut dengan menguraikan penyebab perilaku seseorang ataupun dirinya sendiri yang penentuan perilakunya disebabkan secara internal misalnya dari karakter seseorang, sikap, dan sebagainya, sedangkan secara eksternal contohnya dari paksaan kondisi atau keadaan tertentu yang dapat memberikan akibat atau dampak berkenaan dengan tindakan seseorang (Junita & Segarawasesa, 2023).

Menurut Purnaditya & Rohman (2015), dalam Purba, (2023) bahwa teori atribusi mengemukakan “apabila individu itu melihat perilaku seseorang disebabkan oleh penyebab internal atau eksternal”. Berikut “perilaku diturunkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, persepsi dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara ekternal adalah perilaku yang mampu ditimbulkan dari

luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena keadaan atau lingkungan misalnya terdapat pengaruh sosial dari orang lain". Berikut contoh dari perilaku internal adalah kesadaran dalam membayarkan pajak secara disiplin dan tepat waktu, sedangkan perilaku eksternal disebabkan dengan situasi seperti adanya paksaan atau mendapatkan teguran dari seseorang maupun otoritas pajak agar segera membayarkan pajaknya. Penentuan suatu perilaku tersebut dipengaruhi oleh 3 elemen, meliputi:

1. Kekhususan, berarti bahwa seseorang bisa mengenali perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang barlainan. Jika perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal, dan sebaliknya apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, dimaknai jika setiap orang memegang pendapat serupa mengenai reaksinya terhadap perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsesusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal, dan apabila konsensusnya rendah termasuk atribusi ekternal.
3. Konsistensi, yakni apabila seseorang memperkirakan perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan apabila hal itu tercapai akan terjadinya atribusi ekternal. Begitu sebaliknya jika tidak, maka dijelaskan dengan akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Teori atribusi biasanya orang cenderung mencari penyebab perilaku. Berikut ada 2 (dua) jenis atribusi utama Junita & Segarawasesa (2023), antara lain:

1. Atribusi Internal yaitu ketika seseorang menyalahkan faktor internal atau karakteristik pribadi untuk menjelaskan perilaku. Contohnya, menganggap keberhasilan seseorang sebagai hasil dari kecerdasan atau keterampilan.
2. Atribusi Eksternal yaitu ketika seseorang menyalahkan faktor eksternal atau situasional untuk menjelaskan perilaku. Contohnya memperkirakan kegegalan seseorang kepada keadaan yang sulit atau keberuntungan yang buruk.
3. Perpajakan
4. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 berbunyi pajak adalah “iuran wajib yang terutang baik dari orang pribadi atau badan (organisasi) yang biasa disebut dengan partisipasi wajib pajak terhadap negara tanpa mengharapkan imbalan secara langsung serta dimanfaatkan untuk menjalankan keperluan pemerintahan yang dipergunakan sebagai kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat”. Wajib pajak merupakan individu atau entitas hukum yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembayaran pajak dan harus melaporkan pendapatan atau kegiatan keuangan mereka kepada otoritas pajak serta membayar jumlah pajak berdasarkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019;3).

1. Pengelompokkan pajak

Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya terdiri dari 2 macam yang dijelaskan Mardiasmo (2019;8-9), yakni:

1. Pajak Pusat, merujuk pada jenis pajak yang dikenakan melalui pemerintah pusat atau nasional dengan diatur, diperoleh, dan dikelola oleh otoritas pusat suatu negara. Pendapatan dari pajak pusat dipergunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah pusat, termasuk program-program pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan lainnya. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
2. Pajak Daerah, yakni pajak yang dikenakan dan dikelolakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah tingkat lokal, seperti pemerintah kabupaten atau kota. Penghasilan dengan diperoleh dari pajak daerah diterapkan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan, pembangunan lokal, dan pelayanan publik. Pajak daerah mencakup pada Pajak Provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, sedangkan pada Pajak Kabupaten /Kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan ha katas tanah dan bangunan.
3. Hambatan Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat beberapa kendala yang bisa terjadi, menurut Mardiasmo, (2019;12-13) berikut hambatan pada suatu pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi 2 meliputi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayarkan pajaknya, dapat diakibatkan pada beberapa faktor sebagi berikut:

1. Pertumbuhan intelektual serta moral masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam sistem perpajakan dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Sistem pengendalian kurang bisa dijalankan secara baik.
4. Perlawanan Aktif

Hal ini adalah tindakan atau upaya yang dikerjakan oleh wajib pajak untuk menentang atau menolak pelaksanaan aturan pajak mencakup protes, penolakan dalam membayarkan pajak, atau bahkan tindakan hukum sebagai perlawanan terhadap kebijakan perpajakan. Bentuknya sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*, praktik yang dikerjakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal, mungkin dengan melibatkan penggunaan celah perundang-undangan pajak atau strategi perencanaan pajak yang sah untuk mengoptimalkan situasi keuangan tanpa melanggar ketentuan hukum.
2. *Tax Evasion*, tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar melalui cara melakukan manipulasi, menyembunyikan pendapatan, atau memberikan informasi palsu kepada ootoritas pajak, ini merupakan usaha atau tindakan yang melanggar hukum dalan perpajakan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2019;399), bumi merupakan lapisan tanah serta tubuh bumi terdapat di bawahnya. Permukaan bumi terbagi menjadi daratan serta lautan dengan berbagai fitur geografis seperti gunung, lembah dan dataran, serta laut, sedangkan bangunan yaitu struktur fisik yang dibangun untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. PBB yaitu jenis pajak yang ditanggung atas kepemilikan maupun penggunaan lahan dan gedung yang dipunyai warga negara maupun badan hukum. Tujuannya untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah serta dimanfaatkan untuk kegiatan atau program-program yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan publik dan juga pembangunan daerah.

Pajak sesuai dengan cara pada pemungutannya, yakni ada pajak dengan dipungut melalui pemerintahan pusat serta yang pemungutannya dilakukan pemerintahan daerah masing-masing, contohnya yakni PBB. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Mengenai PBB dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang kaitannya dengan hak guna tanah atau pemerolehan dengan pemanfaatan tanah tersebut dan kepemilikan serta penguasaan atas bangunan tersebut (Sasmahera et al., 2021).

1. Objek Pajak
2. Peada penjelasan Mardiasmo, (2019;401-402), objek pajaknya dapat diklasifikasi menurut pengelompokkannya “mengacu pada nilai jualnya dan diperlukan sebagai pedoman, supaya mempermudahkan perhitungan pajak yang harus dibayarkan”. Pada penentuan klasifikasi bumi/tanah ini meliputi pajak yang ditanggung pada nilai tanah yang dimiliki, biasanya didasarkan pada luas tanah, lokasi, dan nilai pasar tanah tersebut. Sedangkan pada penentuan klasifikasi bangunan juga mencakup pajak dapat dikenakan pada nilai bangunan atau struktur yang berdiri diatas tanah, biasanya didasarkan pada nilai pasar bangunan yang berupa rumah tinggal, gedung, komersial, pabrik dan lainnya.
3. Pengecualian objek pajak

Objek pajak dengan bebas tanggungan dalam PBB menurut Mardiasmo (2019;402-403), meliputi:

1. Dipergunakan semata-mata sebagai membantu kepentingan umum serta tidak dimanfaatkan sebagai kesempatan dalam mencari keuntungan, meliputi pada bidang ibadah (masjid, gereja, vihara), bidang kesehatan (rumah sakit), bidang pendidikan (madrasah, pesantren), bidang sosial (pantia asuhan), dan bidang kebudayaan nasional (museum, candi).
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan lain-lain.
3. Adapun seperti hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Dipergunakan oleh badan atau perwakilan (organisasi) internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Objek pajak yang dipergunakan oleh negara untuk pengelolaan pemerintah, penetapan ketetapan pajaknya diatur lebih lanjut dengan menggunakan peraturan pemerintah. Dapat dimaksudkan dengan objek pajak yang dikuasai serta dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara dengan dari sebagian besar penerimaannya tersebut dipergunakan untuk penyediaan fasilitas dimana akan dirasakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka dengan begitu, wajar apabila pemerintah pusat juga turut serta membantu atau mengalokasikan anggaran pengadaan fasilitas melalui pembayaran pajak tersebut (Mardiasmo, 2019;403).
7. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 40 Ayat 3 Mengenai "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap wajib pajak”. Apabila “WP memiliki banyak objek pajak, maka hanya satu objek pajak yang ditetapkan dalam NJOPTKP yang merupakan nilainya paling tinggi sedangkan objek pajak lainnya tetap ditanggung secara penuh tanpa dipotong dari NJOPTKP”.
8. Tarif Pajak

Tarif PBB di Indonesia bisa bervariasi berdasarkan dengan aturan yang berlaku pada masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiiki kewenangan untuk menentukan tarif PBB di wilayahnya. Pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 41 "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, tarif PBB setinggi-tingginya yaitu 0,5%”. Bagi Kabupaten Tegal, tarif PBB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 "Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", diputuskan yakni:

1. 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah),
2. 0,2% untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah),
3. Tarif untuk berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1%.
4. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 40 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa “dasar perhitungan pajaknya ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi NJOPTKP. Pada penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan 3 tahun sekali, melainkan beberapa objek pajak tertentu dapat ditentukan setiap tahunnya tergantung perkembangan wilayahnya”. Pada penetapan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan menimbang adanya pendapat Gubernur/Bupati/Wali Kota (Pemerintah Daerah) setempat memperhatikan asas *self assessment*. Pada *Assessment value* merupakan nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, merupakan suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya (Mardiasmo, 2019;407).

1. Perhitungan Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP, dalam penjelasan Mardiasmo (2019;407-408).

PBB = Tarif Pajak × NJKP (nilai jual kena pajak)

= 0,5% × [persentase NJKP × (NJOP – NJOPTKP)]

Besarnya presentase NJKP ditentukan sebagi berikut:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
2. Objek pajak perkebunan,
3. Objek pajak kehutanan,
4. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
6. Objek pajak pertambangan,
7. Obejek pajak lainnya, yang NJOP nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Partisipasi
9. Pengertian Partisipasi

Menurut Hutagalung (2022;9), partisipasi dapat dipahami dengan turut ikut berperan serta dalam aktivitas, kegiatan atau suatu program. Berikut merupakan berbagai definisi partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan sumbangan tanpa paksaaan yang berasal dari masyarakat terhadap suatu program tanpa keikutsertaan pada penentuan keputusan.
2. Partisipasi merupakan suatu langkah yang aktif bahwa seseorang mempergunakan kebebasan melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Partisipasi merupakan keikutsertaan dari masyarakat pada suatu pembangunan dikehidupan dan lingkungan masing-masing.
4. Partisipasi merupakan kontribusi atas kehendak sendiri didalam diri masyarakat dalam transformasi dimasa yang akan datang.
5. Partisipasi merupakan sikap kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan atau program.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah peran serta dan keterlibatan utama masyarakat pada pemerintah dalam hal membantu dan membagikan gagasan untuk meningkatan, memperlancar, serta mendukung terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah ditentukan. Partisipasi tersebut mengacu pada seseorang yang ikut serta dalam menetapkan kebijakan, mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan program, dan mencapai hasil, serta pemanfaatan sepenuhnya. Dengan begitu partisipasi dalam bentuk dorongan masyarakat sangat penting agar segala upaya yang dipersiapkan berhasil, karena pembangunan pemerintah dijalankan juga dengan tujuan memperluas keberlanjutan negara (Agustin & Mustoffa, 2023).

1. Unusr-unsur Partisipasi

Menurut opini Amilia et al., (2020) dalam Agustin & Mustoffa (2023), ada beberapa unsur-unsur utama antara lain:

1. Adanya keluangan seseorang supaya ikut berpartisipasi.
2. Adanya kesediaan masyarakat luas untuk turut berpastisipasi dalam mensukseskan kegiatan atau program.
3. Masyarakat mempunyai kesanggupan untuk ikut berpartisipasi.
4. Bentuk Partisipasi

Menurut Efendi dalam Kaehe et al., (2019), berikut ini terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dijelaskan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Partisipasi vertikal merupakan peran serta yang terjadi dalam bentuk kondisi atau syarat tertentu dengan orang yang bersangkutan dalam suatu kegiatan pihak lain. Ini mencakup interaksi antara tingkatan yang berbeda, seperti antara manajemen tingkat atas atau bawah untuk mencapai tujuan bersama dan pengambilan keputusan.
2. Partisipasi horizontal yaitu bentuk peran aktif di antara individu dengan lainnya yang memiliki tingkat otoritas sejajar atau setara. Hal ini merupakan kolaborasi dan pertukaran ide serta informasi antara anggota tim dengan departemen tanpa adanya perbedaan tingkat kekuasaan, tujuannya adalah untuk menciptakan kerja sama yang sejajar dengan mencapai tujuan bersama.
3. Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Kaehe et al., (2019), partisipasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, keterlibatan individu atau kelompok dalam memberikan masukan yaitu mencakup dalam memberikan pendapat, menyumbangkan ide, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yag lebih baik.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, keterlibatan aktif seseorang dalam menjalankan atau melaksanakan keputusan dan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan kontribusi nyata, kerja sama, dan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang disepakati.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, peran aktif dalam menikmati atau memanfaatkan hasil dari keputusan maupun tindakan yang telah diambil. Dengan keputusan apakah suatu adanya peningkatan atau *output*.
4. Partisipasi dalam evaluasi, keterlibatan aktif individu tersebut dalam proses penilaian atau peninjauan kinerja suatu kebijakan, program, atau proyek. Dalam hal ini melibatkan untuk memberikan masukan, menyumbangkan perspektif, dan berkontribusi pada penilaian terhadap efektivitas, keberlanjutan, atau perbaikan yang mungkin diperlukan.
5. Dimensi Partisipasi

Menurut rusidi dalam Tawai & Yusuf (2017;14), bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dimensi partisipasi antara lain:

1. Pencurahan atau yang disebut dengan sumbangan pikiran yaitu berupa pandangan atau ide-ide.
2. Penyaluran atau sumbangsih materil (dana).
3. Serta sumbangan tenaga.
4. Indikator partisipasi

Menurut Watson dalam Kaehe et al., (2019), elemen dapat diukur atau diamati untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu aktivitas. Berikut indikator partisipasi yakni:

1. Faktor internal, faktor tersebut timbul dari kelompok masyarakat itu sendiri yang merupakan perseorangan dan kesatuan kelompok didalamnya. Perilaku seseorang ditetapkan oleh karakteristik sosiologis berupa gender, umur, pengetahuan, serta pekerjaan.
2. Faktor eksternal, faktor tersebut bisa diuraikan dengan *stakeholder* yakni seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dan memiliki dampak atas program yang dijalalankan pada perusahaan tersebut. Dalam artian siapa yang mempunyai pengaruh atau posisi penting atau krusial didalam perusahaan tersebut dengan tujuan mensukseskan program.
3. Fungsi Partisipasi

Menurut Carter dalam Kaehe et al., (2019) Ada beberapa fungsi dari partisipasi masyarakat antara lain:

1. Keterlibatan masyarakat bisa meningkatkan legitimasi kebijakan.
2. Dapat memberikan pelatihan dan dukungan agar masyarakat dapat berperan aktif.
3. Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi individu untuk merasa memiliki kontribusi yang berarti dalam hal ini.
4. Partisipasi dapat berperan dalam meredakan konflik dan dapat menyelesaikan permasalahan.
5. Partisipasi masyarakat mampu memberikan kemampuan untuk memahami yang lebih baik kepada individu.
6. Manfaat Partisipasi

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat, menurut Kaehe et al., (2019), yaitu:

1. Memiliki tanggung jawab yang kuat supaya memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan.
2. Meningkatkan pemahaman dalam proses partisipasi untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Mengakibatkan dan timbul adanya dukungan serta penerimaan terhadap strategi pemerintah.
4. Membentuk kesadaran sosial.
5. Kesimpulan dari hasil partisipasi dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan masyarakat.
6. Terbentuk sumber yang berasal dari informasi yang bermanfaat dapat dikatakan dengan komitmen sistem demokrasi.
7. Motivasi
8. Pengertian Motivasi

Didalam menjalankan kehidupan, semua orang pasti mengharapkan adanya sebuah dorongan atau yang sering dikenal dengan istilah motivasi. Motivasi adalah perasaan pada diri seseorang tersebut yang membuat ingin melakukan sesuatu, yaitu berupa sesuatu yang seseorang pikirkan satau sesuatu yang bahkan tidak disadari dengan tindakan yang dirasakan. Motivasi membantu seseorang dalam menetapkan tujuan dan mengambil tindakan yang dicapainya, hal ini juga dapat membuat seseorang merasakan senang serta puas ketika melakukan sesuatu yang diinginkan. Motivasi yaitu seberapa semangatnya dan penuh tekad seseorang terhadap pekerjaanya, baik dari sikap mereka terhadap situasi kerja. Ketika seseorang termotivasi, mereka memiliki energi untuk bekerja keras dan membantu suatu organisasi mencapai tujuannya (Hamid, 2018;128).

1. Bentuk-bentuk Motivasi

Menurut Fahmi, dalam Hamid (2018;137-138), bentuk-bentuk motivasi melibatkan berbagai faktor yang memotivasi individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, adapun bentuk motivasi meliputi:

1. Motivasi Ekstrinsik (Dari Luar)

Motivasi ini merupakan pendorong yang berasal dari faktor-faktor luar diri seseorang, dengan mencakup insentif atau ganjaran eksternal yang memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan, untuk mendorong seseorang tersebut dalam membangun dan menumbuhkan semangatnya, serta untuk merubah sikap yang dimiliki seseorang tersebut pada saaat ini supaya ke tujuan yang lebih baik lagi.

1. Motivasi Intrinsik (Dari Dalam Diri Seseorang/Kelompok)

Pada bentuk ini mengacu pada dorongan atau keinginan untuk melakukan suatu aktivitas karena kepuasan pribadi atau kepentingan yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena tekanan eksternal. Contohnya rasa kepuasan pribadi, keinginan untuk tumbuh dan berkembang, atau minat yang mendalam terhadap suatu topik atau kegiatan.

1. Unsur-unsur Penggerak Motivasi

Pada hal ini unsur penggerak motivasi digunakan untuk mendorong atau menguatkan individu atau kelompok yang hendak mencapai tujuan tertentu. Menurut Hamid (2018;138-139), adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Kinerja (*Achievement*) yaitu merujuk pada pencapaian atau hasil yang dihasilkan oleh individu sebagai respons terhadap upaya atau kerja keras yang dilakukannya. Kesuksesan atau pencapaian pribadi dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan motivasi.
2. Penghargaan (*Recognition*) yaitu memberikan apresiasi atau pujian kepada seseorang atas kinerja, pencapaian, atau kontribusi mereka. Elemen ini penting dalam memotivasi orang untuk melakukan lebih baik dan merasa dihargai.
3. Tantangan (*Chalenge*) yaitu kondisi yang memerlukan usaha, kreativitas, atau keberanian untuk mengatasinya, tantangan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti tugas yang kompleks, masalah, atau situasi yang mengharuskan seseorang untuk beradaptasi dan menemukan solusi.
4. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kewajiban atau tugas yang diemban oleh individu untuk melakukan sesuatu secara tepat, bersikap adil, atau menenuhi standar tertentu. Tanggung jawab dianggap unsur penting dalam pembentukan karakter seseorang.
5. Pengembangan (*Development*) yaitu proses aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempeluas suatu tindakan, seperti keterampilan, produk, atau sistem guna mencapai hasil yang lebih baik atau lebih maju.
6. Keterlibatan (*Involvement*) yaitu kondisi terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan, situasi, hubungan atau tindakan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan peran serta dalam suatu pengembangan atau pembangunan.
7. Kesempatan (*Opportunity*) yaitu situasi yang memberikan potensi untuk mendapatkan manfaat atau mencapai sesuatu yang diinginkan lebih baik lagi.
8. Pendorong Motivasi

Pendorong motivasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan. Pada penelitian McClelland dalam Hamid (2018;140-141), memfokuskan pada beberapa faktor yaitu:

1. *Achievement Motivation* (motivasi berprestasi) merupakan konsep dalam psikologi yang merujuk pada dorongan individu untuk meraih pencapaian yang signifikan, menetapkan tujuan yang ambisius, dan mencari keberhasilan. Dalam hal tersebut cenderung mempunyai dorongan internal yang kuat supaya dapat memperoleh sesuatu yang baik lagi atau lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
2. *Affiliation Motivation* (motivasi untuk berafiliasi) adalah merujuk pada kebutuhan individu untuk terlibat dalam hubungan sosial, bersosialisai, dan memiliki interaksi positif dengan orang lain, dalam hal ini cenderung mencari hubungan interpersonal yang erat, mencari dukungan sosial, serta mampu bekerja sama dengan baik. Motivasi ini dapat berasal dari dorongan untk menciptakan ikatan emosional, mengurangi ketidakpastian melalui dukungan sosial, atau membangun rasa keterikatan dalam suatu kelompok.
3. *Power Motivation* (motivasi akan kekuasaan) yaitu mencakup dorongan atau keinginan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, pengaruh, atau kontrol atas orang lain, situasi, atau lingkungan. Seseorang dengan *power motivation* yang seimbang dapat menggunakan kekuasaan dengan cara yang positif, sementara yang berlebihan bisa mengejar kukuasaan tanpa mempertimbangkan dampanya.
4. Teknik Motivasi

Didalam diri seseorang, motivasi merupakan peran penting karena dapat menjadi pendorong untuk mencapai tujuan, mengatasi hambatan, dan menjaga semangat dalam menhadapi suatu tantangan. Dalam hal tersebut ada 6 (enam) teknik dalam memotivasi, yaitu selalu berfikir positif dalam artian dapat memberikan dorongan postif kepada siapapun; dapat menciptakan perubahan yang kuat misalnya merubah situasi dan perasaan yang awalnya tidak mampu akan menjadi mampu; dapat membangun harga diri; memantapkan penyelenggaraan dengan cara kerja dan tindakan yang benar; mampu membangkitkan orang lemah menjadi kuat dengan keteguhan, rajin bekerja, ada kemauan belajar dari orang lain, serta dan menghilangkan rasa atau sikap suka menunda-nunda (Hamid, 2018;141-142).

1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Penjelasan Mengenai Kesadaran

Kesadaran secara luas dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan pengenalan terhadap diri sendiri, serta lingkungan sekitar dengan cara bagaimana bertindak atau menyikapinya terhadap realitas. Keasadaran wajib pajak adalah tahap kesadaran individu terhadap kewajibannya mengenai pelunasan pajak sesuai dengan peraturan yang berjalan di negara tersebut, serta dapat melibatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis pajak, ketentuan perpajakan, dan tanggung jawab untuk melaporkan maupun membayarkan pajaknya berdasarkan undang-undang. (Kuriawan & Aini, 2019).

Kesadaran wajib pajak ini mencakup pengetahuan akan kewajiban perpajakan, tentang cara melaporkan pendapatan, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam sistem ini demi pembiayaan kebijakan publik dan pembangunan negara. Apabila seorang yang menunda penyetoran atau pembayaran pajak pasti akan merugikan negara, karena dana pajak yang terkumpul akan digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta keamanan. Berikut kesadaran wajib pajak sebagaimana berhubungan dengan PBB sesuai penejalasan yang dilakukan oleh Hidayat & Gunawan (2022), adalah:

1. Selaku orang yang mendapatkan kegunaanya atas tanah serta bangunannya, wajib pajak pasti mempunyai kewajiban dalam membayarkan pajaknya akan objek yang dikuasai maupun dimanfaatkan dengan tepat waktu.
2. Orang tersebut sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan pemerintahan untuk mendanai berbagai program serta layanan publik. Pemahaman dalam pembayaran pajak dapat dipahami dengan kesadaran untuk ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Pengaruh Kesadaran

Menurut Herlina (2020), kesadaran seorang wajib pajak bisa dipengaruhi pada unsur sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berkaitan atau dapat dipengaruhi dengan pengetahuan masyarakat mengenai pajak.
2. Adanya derajat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi pengetahuan wajib pajak pada pembayaran pajaknya, terutama bagi masyarakat yang kurang paham dalam hal tersebut, sering sekali merasakan kesulitan dalam mengisi formulir pajak.
3. Adanya tranparansi sistem perpajakan dari pemerintah dengan maksud untuk tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah dan juga supaya tidak terjadi kecurangan.
4. Perlunya memahami fungsi dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, yaitu dipergunakan untuk pembanguan, kesejahteraan masyarakat serta keperluan ekonomi pemerintah.
5. Indikator Kesadaran

Pada hal ini melibatkan beberapa faktor yang digunakan untuk dapat mengetahui tahap kesadaran seorang wajib pajak menurut Herlina (2020), antara lain:

1. Pengetahuan mengenai manfaat atau fungsi dari perpajakan.
2. Penegakkan tanggungan perpajakan sesuai dengan keputusan atau peraturan pada perpajakan.
3. Dapat mengetahui adanya manfaat dan fungsi suatu pajak untuk pembiayaan pemerintah yang digunakan dengan sebaik-baiknya.
4. Melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Pentingnya pengetahuan mengenai UU dan ketetapan perpajakan yang telah tercantum.
6. Sanksi Pajak
7. Pengertian Sanksi

Sanksi perpajakan dapat dijelaskan dengan konsekuensi atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak terhadap entitas yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini bertujuan sebagai pendorong kepatuhan dan penegakkan hukum dalam sistem pajak. Jenis sanksi dapat mencakup denda, bunga keterlambatan, atau sanksi administratif lainnya. Selain itu, dalam kasus pelanggaran serius, ada kemungkinan tindakan pidana atau hukum yang melibatkan pengadilan. Sistem sanksi perpajakan dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan dan memberikan kontribusi yang sesuai dengan peraturan (Romdhoni et al., 2023).

Didalam penjabaran menurut Mardiasmo (2019) dengan mendefinisikan “sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan”. Dalam undang-undang perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran peraturan perpajakan ada yang hanya dikenai dengan sanksi administrasi saja, ada juga yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan juga ada yang diancam dengan kedua sanski tersebut.

1. Jenis Sanksi

Pada UU RI No. 12 Tahun 1985 Tentang "Pajak Bumi Dan Bangunan, sebagimana adanya perubahan dengan UU RI No. 12 Tahun 1994", dikenal ada 2 bentuk sanksi, berikut penejelasannya:

1. Sanksi administrasi dikenakan dalam bentuk hukuman atau tindakan yang diberlakukan oleh otoritas pajak sebagai respons terhadap pelanggaran ketidakatuhan perpajakan yang bersifat nonkriminal, sanksi administrasi meliputi denda maupun bunga keterlambatan, Pada hal pajak bumi dan bangunan akan mengakibatkan seseorang terlibat mendapatkan sanksi meliputi:
2. Apabila WP tidak melaporkan kembali SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) pada tenggat yang dicantumkan dan setelah diberitahukan secara tertulis tidak dilaporkan sebagimana ditentukan dalam surat peringatan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
3. Apabila setelah diteliti dan diperiksa ternyata Surat Pemberitahuan Objek Pajak salah (lebih kecil), maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdapat sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya Pajak terutangnya.
4. Sanksi pidana ditetapkan dengan merujuk pada tindakan hukuman atau tuntutan pidana yang diberlakukan oleh pihak berwenang terhadap wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran serius mengenai aturan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan pajaknya. Dalam menerapkan sanksi ini, pihak berwenang perlu membuktikan adanya pelanggaran dengan bukti yang kuat. Sanksi pidana pada PBB adalah:
5. Tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan Pajak terhadap Direktorat Jendral Pajak.
6. Mengungkapkan SPOP melainkan dengan melampirkan keterangannya salah atau tidak lengkap.
7. Tidak membuktikan data yang dibutuhkan, oleh karena itu dapat menimbulkan kerugian pada negera, maka bisa dikenakan kurungan selama-lamanya 2 tahun.
8. Indikator Sanksi Pajak

Dalam sanksi pajak terdapat indikator yang perlu diketahui, menurut Herlina (2020) adalah sebagai berikut:

1. Tindakan didalam perpajakan perlu dilakukan untuk membentuk seseorang yang disiplin, sehingga sanksi yang dikenakan juga harus jelas.
2. Penjatuhan pada sanksi pajak perlu bersifat dengan tegas (tidak sembarangan) sehingga tidak dapat dikenal dengan kompromi.
3. Penjatuhan sanksi yang diartikan harus sesuai dengan ukuran pelanggarannya yang telah dilanggar oleh wajib pajak, dalam artian tersebut, maka sanksi yang dikenakan harus seimbang.
4. Hukuman yang dikenakan harus sesuai akan ketetapan yang berlaku, dengan demikian sanksi tersebut mampu memberikan efek jera untuk pelanggarnya.
5. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, memungkinkan penulis untuk menambahkan teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukannya. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yaitu:

1. Penelitian dari Kaehe et al., (2019), dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara’. Metode penelitiannya “metode deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan obeservasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen. Hasilnya adalah partisipasi masyarakat masih kurang baik, karena masyarakat masih kurang menyadari pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan”.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kaehe et al., (2019) terletak pada, objek penelitian beserta variabelnya yang jauh berbeda tetapi terdapat kesamaan makna dari penelitian tersebut mengacu pada partisipasi masyarakat.

1. Penelitian dari Fauzi & Kismadani, (2019), berjudul “Pengaruh Motivasi Terhadap Kedisiplinan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”. Metode penelitiannya memakai “penelitian kuantitatif, mempergunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat pengaruh motivasi terhadap disiplin masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo”.

Perbedaannya dengan penelitian Fauzi & Kismadani, (2019) terdapat pada, variabel bebas yaitu penelitian ini menambahkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak serta merubah variabel dependen dengan partisipasi pembayaran PBB. Terdapat persamaan yaitu pada variabel independen berupa motivasi.

1. Penelitian dari Kuriawan & Aini, (2019), berjudul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”. Metode penelitiannya diterapkan melalui ‘analisis kuantitatif dan kualitatif dengan metode pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dan metode kuesioner. Hasilnya menandakan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Pelembang (studi empiris di Kecamatan Plaju)”.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Kuriawan & Aini, (2019) berada pada variabel independen yaitu mengganti variabel pemahaman dengan menambahkan variabel motivasi dan merubah variabel dependennya, serta terdapat persamaan pada variabel independen berupa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

1. Penelitian dari Herlina, (2020), berjudul “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci”. Metode penelitiannya merupakan “pendekatan kuantitatif, *simple random sampling* sebagai teknik pengumpulan sampel dan metode analisisnya yakni analisis regresi linear berganda. Hasil secara bersama-sama maupun persial menunjukkan sanksi pajak, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB di Kabupaten Kerinci”.

Perbedaannya dengan yang dilakukan oleh Herlina, (2020) terdapat pada, variabel independen, yakni merubah variabel kualitas pelayanan yang mana menambahkan variabel motivasi, dan merubah variabel dependennya dengan partisipasi pembayaran (PBB), serta objek dan periode juga berbeda. Dengan begitu, terdapat juga persamaannya yaitu pada variabel independen yang berupa sanksi dan kesadaran perpajakan.

1. Penelitian dari Sasmahera et al., (2021), berjudul “Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, Dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo). Penelitiannya metode deksriptif kuantitatif menyebar kuesioner dengan sampel random sampling”. Hasil menunjukkan “variabel sikap memiliki pengaruh secara persial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh, serta kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, sanksi, dan sikap secara simultan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB”.

Perbedaan dengan penelitiannya yang diselesaikan Sasmahera et al., (2021) terletak pada, variabel independen yang mana mengganti beberapa variabel dengan menambah 1 yaitu variabel motivasi, serta objek dan periode dalam penelitian ini berbeda. Meskipun demikian, terdapat juga persamaannya pada variabel independen meliputi kesadaran dan sanksi serta variabel dependen dengan partisipasi pembayaran PBB.

1. Penelitian dari oleh Hidayat & Gunawan, (2022), dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Jenis datanya adalah data primer dengan teknik pengumpulan datanya yaitu metode angket yaitu penyebaran (kuesioner)”. Hasil penelitiannya “memperlihatkan kesadaran wajib pajak, tingkat sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan secara persial bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak dipengaruhi dibandingkan dengan kualitas pelayanan perpajakan terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”.

Perbedaan antara penelitiannya Hidayat & Gunawan, (2022) terletak pada, variabel bebasnya yaitu mengganti variabel kualitas pelayanan perpajakan dengan menambahkan variabel motivasi, serta terdapat variabel dependen yang berbeda yaitu merubah variabel kapatuhan dengan variabel partisipasi pembayaran PBB. Persamaan pada penelitian ini terletak divariabel independen berupa variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan.

1. Penelitian dari Supriatna, (2022), dengan judul “Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Padamukti Tahun 2017-2020”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian “deskriptif kualitatif dengan metode dokumentasi serta wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa insentif, otoritas pajak dan sanksi melalui kondisi keuangan tidak berpengaruh signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatannya”.

Perbedaan pada penelitan yang dikerjakan oleh Supriatna, (2022) adalah terletak pada, metode penelitian, objek penelitian, serta variablenya yang berbeda akan tetapi mempunyai kesamaan meneliti kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB).

1. Penelitian dari Agustin & Mustoffa, (2023), berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem)”. Metode deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung dan sumber data primer. Hasilnya menunjukkan “partisipasi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan 3 unsur utama yaitu terbuknya peluang yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta membayar PBB, menyamaikan pajaknya dengan tepat waktu, serta rendahnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh faktor ekonomi dan SPPT yang dicantumkan terkadang tidak benar”.

Perbedaannya berupa pada metode penelitian, objek penelitian, serta variabel dalam penelitian Agustin & Mustoffa, (2023) menjelaskan bahwa, variabel independennya merujuk pada partisipasi masyarakat dan variabel dependennya membayar PBB, sedangkan penelitian ini partisipasi membayarkan pajak bumi dan bangunan terdepat pada variabel dependen. Sehingga jurnal tersebut dirujuk untuk mengacu pada variabel dependen.

1. Penelitian dari Junita & Segarawasesa, (2023), berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Purworejo”. Metodenya adalah “penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan kuesioner serta metode analisisnya regresi linier berganda. Hasilnya mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif sedangkan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan *e-*payment tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”.

Perbedaannya pada penelitian ini terletak dibagian judul dengan memuat hanya 1 variabel yang mengacu pada faktor yang dimana dapat mempengaruhi dengan kepatuhan WP, perbedaan lainnya juga pada objeknya. Penelitian ini memiliki kesamaan pada metode penelitiannya.

1. Peneltian dari Waang, (2023), dengan judul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor”. Jenis penelitiannya adalah “penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi, serta penelitian ini dengan data primer. Hasilnya menunjukkan bahwa soslialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara persial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kapatuhan wajib pajak dalam membayar PBB”.

Perbedaan pada, objek penelitian, dan variabel bebasnya adalah menggantikan variabel sosialisasi pajak yaitu dengan variabel motivasi, serta merubah variabel dependen menjadi partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pada persamaannya terletak dimetode penelitiannya.

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Diradimalata Kaehe, Joorie M. Ruru, Welson Y. Rompas, 2019. | “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara” | Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Pintareng masih kurang baik, karena masyarakat masih kurang menyadari pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat pada perencanaan pembangunan di desa Pintareng masih kurang baik. |

Lanjutan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Hasan Muchtar Fauzi, Fridasanti Dwi Kismadani, 2019 | “Pengaruh Motivasi Terhadap Kedisiplinan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Situbondo” | Hasilnya diketahui nilai thitung 8,753 > ttabel 1,984. Maka diambil kesimpulan bahwa nilai signifikansi 0,000 berada dibawah 0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima, adanya pengaruh motivasi terhadap kedisiplinan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dikelurahan Dawuhan Kec. Situbondo |
| 3. | M. Orba Kurniawan, Dewi Aini, 2019 | “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran WP, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB 2P Pada BPPD Kota Palembang” | Hasil penelitiannya pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB2P pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). |
| 4. | Vivi Herlina, 2020 | “Pengaruh Sanksi, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kabupaten Kerinci" | Hasil penganalisaan baik secara simultan ataupun persial menyajikan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. |
| 5. | Ria Nia Sasmahera, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang, 2021 | “Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB” | Hasilnya variabel sikap berpengaruh secara persial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Variabel lainnya kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, dan sanksi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, serta kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, sanksi, dan sikap secara simultan berpengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat dalam membayar PBB. |

Lanjutan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Imam Hidayat dan Steven Gunawan, 2022 | “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” | Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Tanggerang Selatan Tahun 2021. |
| 7. | Satria Supriatna, 2022 | “Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Padamukti Tahun 2017-2020” | Hasil penetilian menunjukkan:   1. Terbukti motivasi, otoritas pajak, dan sanksi pajak melewati kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. 2. Kepatuhan wajib pajak pada PBB di Desa Padamukti tahun 2017-2020 yaitu, 2017 (59%), 2018 (58%), 2019 (53%), 2020 (53%). 3. Hambatan yang dirasakan dalam merealisasaikan kepatuhan wajib pajak di Desa Padamukti yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta tingkat pendapatan wajib pajak. 4. Cara menghadapi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada WP dan dengan memerika tarif pajak. |

Lanjutan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Murnita Wahyu Agustin, Ardyan Firdausi Mustofa, 2023 | “Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem)” | Hasilnya menunjukkan partisipasi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan 3 unsur utama, termasuk peluang yang terbuka lebar agar masyarakat turut serta membayar PBB, artinya SPPT telah disampaikan kepada WP secara tepat waktu oleh Kantor Desa Pubpelem, tidak hanya itu kurangnya kemauman masyarakat Desa Puhpelem untuk membayar pajak disebabkan oleh fakor ekonomi, namun juga disebabkan oleh SPPT yang memuat data yang tidak benar. Di dalam membayar PBB, kemauman masyarakat Desa Puhpelem dikatakan baik. |
| 9. | Cita Junita, Fajar Satriya Sgarawasesa, 2023 | “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Purworejo”. | Hasilnya memperlihatkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Purworejo, sedangkan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan *e-payment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Purworejo. |
| 10. | Aneka Marta Waang, 2023 | Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor” | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. |

Pada Tabel 2.1 penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan diperoleh dari penelitian sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan berupa bentuk partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaanya terdapat pada objek dalam penelitian ini.

1. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengaruh motivasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

1. Pengaruh motivasi terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Motivasi mampu dikatakan dengan kekuatan internal yang mendorong seseorang mengambil tindakan, mencapai tujuan, atau mengejar keinginan yang bersumber dari faktor internal seperti ambisi, keinginan untuk tumbuh, serta dari faktor eksternal seperti pengakuan, dukungan sosial atau reward. Untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar pajak perlu adanya peran dari pemerintah dalam menumbuhkan motivasi masyarakat. Jika motivasi masyarakat tinggi dalam menjalankan kewajiban pajaknya pasti akan berpotensi memberikan sumber daya yang cukup bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan, layanan publik, dan insfrastruktur, serta dapat mengurangi tingkat penggelempangan pajak, dan menghasilkan sistem perpajakan yang lebih stabil dan adil. Maka dengan itu adanya korelasi yang signifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pengetahuan dan tanggung jawab seseorang terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mencakup kesadaran jenis pajak yang harus dibayarkan. Wawasan mengenai peraturan perpajakan, serta niat untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu melalui adanya kontribusi secara baik serta tindakan yang transparan dari pemerintahan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara stabil (Rahayu et al., 2023). Adanya kesadaran WP disini dapat membawa pengaruh signifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan serta kemauan untuk membayar pajaknya.

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Sanksi pajak dapat menggerakkan perilaku individu dengan menguatkan kepatuhan terhadap peraturan dalam perpajakan, dengan adanya sanksi dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk mematuhi kewajibannya dengan lebih cermat, termasuk dalam pembayarannya supaya dapat tepat waktu dan penyajian informasinya harus akurat. Pada sanksinya berupa denda maupun sanksi pidana dapat memberian efek jera bagi yang melanggar dan diharapkan supaya dapat patuh, dengan begitu akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajaknya dengan teratur (Mompala & Asári, 2023). Maka adanya sanksi pajak dapat berpengaruh segnifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan banguanan.

|  |
| --- |
| **Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)**  Motivasi  (X1)  H1  Kesadaran Wajib Pajak  (X2)  H2  Partisipasi Pembayaran PBB  (Y)  H3  Sanksi Pajak  (X3)  **Variabel Kontrol**  Gender  Umur |

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

1. Hipotesis

Hipotesis dipahami sebagai suatu asumsi awal atau dugaan sementara yang diajukan untuk diuji melalui penelitian atau obeservasi guna mendapatkan kesimpulan. Hipotesis akan dibuktikan kebenarannya melalui penggunaan formula statistik yang telah ditetapkan oleh peneliti, adapun hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2. Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3. Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana dalam penelitiannya bersifat deskriptif yang jelaskan menurut Langi et al., (2020), yaitu dapat diartikan untuk menggambarkan permasalahan atau memberikan informasi yang terjadi sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menggambarkan secara aktual apa yang terjadi dilingkungan tersebut berkenaan dengan pengaruh motivasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap partisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Populasi disebut dengan obyek maupun peristiwa yang menjadi fokus analisis di suatu wilayah yang ditentukan oleh penulis dan melengkapi kriteria tertentu berhubungan dengan permasalahan penelitian yang kemudian untuk diambil kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini yaitu keseluruhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sebanyak 48.881 wajib pajak.

1. Sampel

Menurut Sugiyono (2016;81-82) dalam Fauzi & Kismadani, (2019), Sampel merupakan sekelompok elemen atau bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diukur. Data yang diambil merupakan dari sampel yang dapat mewakili dari seluruh populasi. Pada penelitian ini taknik pemilihan sampelnya adalah *probability sampling* melalui pengambilan secara acak yang sering disebut dengan *simple random sampling. Probability sampling* dijelaskan dengan metode pengambilan sampel melalui setiap elemen pada populasi memiliki kemungkinan diketahui untuk terpilih menjadi bagian dari sampel, maka hal tersebut memberikan setiap populasi bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan *simple random sampling* dapat diartikan sebagai metode pengambilan sampel acak sederhana dimana setiap elemen dari populasi mendapatkan peluang yang setara untuk diambil, tanpa memperlihatkan struktur atau karakteristik tertentu.

Berdasarkan jumlah populasinya, sebesar 48.881 responden, maka jumlah sampel yang akan dihitung dengan rumus *Slovin* sebagai berikut:

Keterangan:

*n* = Jumlah Sampel

*N* = Jumlah Populasi

*e* = toleransi kesalahan dengan maksimum 5%

Berikut perhitungannya:

Berdasarkan perhitungan sampel tersebut dengan mempergunakan rumus *Slovin*, sehingga banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 396 sampel dengan membagikan kuesioner di Kecamatan Pangkah yang desanya berjumlah 23, sehingga pembagian sampelnya setiap desa masing-masing ada 17-18 responden.

1. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang mendeskripsikan mengenai karakteristik inti dari suatu konsep atau gagasan suatu masalah yang hendak diteliti, antara lain:

1. Variabel Dependen (Y), yaitu “variabel yang memiliki pengaruh atau dijelaskan oleh variabel lain pada model analisis yang digunakan dan merupakan variabel utama dalam penelitian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan, variabel dependen pada penelitian ini ada pada ‘partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)’” (Mardiasmo, 2019;6).
2. Variabel Independen (X), yaitu “variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pengaruh terhadap variabel lain dalam sebuah penelitian dalam mengendalikan variabel independen adalah untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel ini mempengaruhi variabel dependen, variabel independennya yaitu Motivasi (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3)” (Mardiasmo, 2019;10).
3. Variabel Kontrol, yaitu “variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini bukanlah variabel utama yang akan diteliti dan diuji, tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh. Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu gender dan umur” (Winarno, 2013).
4. Operasional Variabel
5. Variabel (Y), partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) termasuk hal yang utama guna mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini merupakan kewajiban warga negara yang ikut turut dalam memberikan kontribusi serta memperkuat sistem keuangan negara (Agustin & Mustoffa, 2023).
6. Variabel (X1), motivasi merupakan dorongan atau kekuatan seseorang untuk bertindak agar mencapai tujuan, serta memenuhi kebutuhan. Motivasi berasal dari keinginan untuk meraih sesuatu atau kesuksesan, kebutuhan pribadi, dan tanggung jawab sosial (Fauzi & Kismadani, 2019).
7. Variabel (X2), kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pemahaman dan kesadaran yang muncul dari seseorang atau organisasi (badan) terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajaknya secara tepat waktu. Ini mencakup mengenai pemahaman akan perpajakan, serta tanggung jawab hukum untuk bersedia dalam mematuhi kewajiaban tersebut (Herlina, 2020).
8. Variabel (X3), sanksi pajak merupakan konsekuensi atau hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang terhadap individu atau perusahaan yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda atau hukuman lainnya bertujuan untuk memberikan efek jera, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta memberikan insentif agar wajib pajak mematuhi kewajibannya (Waang, 2023).
9. Variabel Kontrol (X4), gender yaitu konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran, perilaku yang dianggap sesuai dengan individu berdasarkan identitas mereka sebagai pria atau wanita (Kurniawan & Winedar, 2023).
10. Variabel kontrol (X5), usia merupakan ukuran waktu yang menggambarkan seberapa lama seseorang telah ada atau berlangsung dalam kehidupan berdasarkan waktu yang telah berlalu sejak kelahiran seseorang dalan satuan tahun, bulan, maupun hari, contohnya perbedaan antara masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (Kartikasari & Estiningrum, 2022).

Definisi operasional variabel dijelaskan dengan langkah-langkah yang dipergunakan untuk mengukur atau mengamati suatu variabel dalam penelitian. Berikut definisi operasional variabel yang ada dipenelitian ini.

Tabel 3.1

Operasional Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **No. Item Pernyataan** | **Skala** |
| Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y)  (Kaehe et al., 2019) | Ikut serta dalam membayar pajaknya | 1. Partisipasi masyarakat pada pembayaran pajak; 2. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT atau membayar pajaknya; 3. Tidak memiliki adanya tunggakan terhadap pembayaran pajak; 4. Menghitung secara pasti jumlah pajak terutang; 5. Tidak akan pernah dijatuhi denda atau hukuman dalam membayar pajak; 6. Apresiasi dari otoritas pajak atau pemerintah untuk masyarakat yang selalu giat dalam membayar pajak. | 31-40 | Interval |
| Motivasi (X1)  (Hamid, 2018) | 1. Ekstrinsik | 1. Adanya kegiatan yang menarik; 2. Mendapatkan penghargaan; 3. Didukung dengan lingkungan yang kondusif. | 1-5 | Interval |
|  | 1. Intrinsik | 1. Hasrat dan keinginan untuk berhasil; 2. Adanya dorongan dan kebutuhan; 3. Harapan dan cita-cita untuk masa depan. | 6-10 |  |

Lanjutan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2)  (Herlina, 2020) | Kesediaan wajib pajak dengan tujuan menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan | 1. Kesadaran wajib pajak mengenai pemahaman pajak; 2. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan dalam ketentuan perpajakan; 3. Kesadaran wajib pajak dengan kewajibannya dalam membayar pajak; 4. Kesadaran wajib pajak terhadap adanya tujuan dari pemungutan pajak; 5. Partisispasi dalam pembayaran pajak; 6. Tingkat kesadaran yang rendah dapat merugikan negara. | 11-20 | Interval |
| Sanksi Pajak (X3)  (Romdhoni et al., 2023) | 1. Sanksi Administrasi | 1. Sanksi dalam pembayaran pajak sesuai dengan peraturan; 2. Takut telat pada hal membayarkan pajak; 3. Takut adanya denda pajak yang semakin meningkat. | 20-25 | Interval |
|  | 1. Sanksi Pidana | 1. Takut nantinya akan dipenjara apabila tidak melaporkan SPT; 2. Takut dipenjara dengan memalsukan dokumen; 3. Memberikan efek jera untuk menumbuhkan penerimaan pajak. | 26-30 |  |
| Variabel kontrol Gender dan umur  (Kurniawan & Winedar, 2023) | 1. Gender, karakteristik 2. Umur, kehidupan | 1. Gender yaitu perbedaan perilaku dan sifat pria atau wanita; 2. Umur yaitu waktu sejak kelahiran seseorang perbedaan antara masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. | - | Interval |

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari data primer. Menurut Hilminawati & Napisah, (2023) “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitiannya tersebut. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui angket atau penyebaran kuesioner yang termasuk dalam metode pengumpulan data primer”. Kuesioner merupakan alat atau formulir memuat serangkaian pernyataan yang disusun untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi atau data dari responden, data yang didapat tersebut melalui kuesioner bersifat langsung dari partisipan. Kuesioner tersebut disampaikan kepada responden setiap desa yang ada di Kecamatan Pangkah dalam bentuk kuesioner yang dicetak dikertas, dengan proses pengisiaannya didampingi oleh peneliti serta penyebaran secara online dengan membagikan *google from*.

Pada penelitian ini menerapkan “skala interval yang dipergunakan untuk mengukur pendapat serta persepsi dari setiap responden”. Skala interval dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan jawaban (Ghozali, 2016), diantaranya:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1.
2. Tidak Setuju (TS) : 2.
3. Kurang Setuju (KS) : 3.
4. Setuju (S) : 4.
5. Sangat Setuju (SS) : 5.
6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan berbagai uji agar temuan yang diperoleh mempunyai kualitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada pembaca. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu:

1. Uji Validitas

Dalam penjelasan Ghozali, (2016;52-60) uji validitas diterapkan untuk “menentukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat menilai secara akurat apa yang ingin diukur, tarkait dengan karakteristik yang akan diukur dengan pernyataan pada kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan tersebut dapat mengukur dengan akurat dan konsisten apa yang seharusnya diukur”. Pengujiaanya dilakukan dengan menggunakan “nilai r tabel, apabila nilai r hitung > dari r tabel maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid”.

1. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2016;47-51) menguraikan bahwa “mengukur suatu instrumen yang diukur dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan pada pengukurnya dengan kuesioner, sebuah kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika memberikan hasil yang konsisten atau stabil ketika diaplikasikan pada populasi atau responden yang sama dalam waktu yang berbeda”. Pengujian reliabilitas ini hanya dilakukan terhadap butir-butir yang valid, yang diperoleh melalui uji validitas. Untuk melihat tingkat reliabilitas data, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas, jika *Cronbach Alpha* > 0.70 maka variabel dikatakan reliabel.

1. Metode Analisis Data
2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mencakup teknik-teknik menggambarkan data, seperti minimum, maksimum, standar deviasi, mean untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai distribusi dan karakteristik data yang diamati. Sebuah variabel dapat diungkapkan memiliki data deskriptif secara baik apabila hasil dari perhitungan nilai mean atau median lebih besar dari nilai standar deviasinya (Ghozali, 2016;19).

1. Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, yaitu:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2016;154), uji normalitas bertujuan untuk “menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Misalnya pada asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil”. Normal dan tidaknya data tersebut dapat diukur melalui nilai signifikannya, “apabila nilai signifikan > 0,05 disebut normal, tetapi apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan tidaklah normal”.

1. Uji Multikolonieritas

Pada penjelasan Ghozali, (2016;103) uji multikolonieritas bertujuan untuk mengidentifikasi “tingkat keterkaitan antara variabel-variabel independen dalam model analisis regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal diartikan dengan tidak adanya hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, dengan kata lain kovariansi variabelnya adalah nol”. Agar menyadari timbulnya multikolonieritas dilihat dari besaran “*variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance.* Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*tolerance*)”. Asumsinya dapat dinyatakan:

1. Jika VIF > 0,10 dari nilai *tolerance* < 0,10 maka dinyatakan terjadinya multikolonieritas,
2. Jika VIF < 0,10 dari nilai *tolerance* > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidakseragaman varians dari suatu variabel acak atau residual dalam analisis regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Apabila terdapat heteroskedastisitas akan menghambat pengujian hipotesis dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas dilakukannya “uji glejser, yang mana apabila nilai signifikan < 0,05 dinamakan timbul heteroskedastisitas, dan demikian sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas” (Ghozali, 2016;134).

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016;93), menyimpulkan bahwa “metode statistik dipergunakan guna memahami keterkaitan dari suatu variabel terkait dengan variabel bebas apakah masing-masing variabel dependen dapat berpengaruh signifikan dan untuk memperkirakan nilai dari variabel terkait, jika nilai variabel bebas (independen) mengalami kenaikan atau penurunan”. Berikut adalah persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

*Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + (*variabel kontrol*) + e*

*Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e*

Keterangan:

Y = Partisipasi Pembayaran PBB

a = Konstanta

b1; b2; b3 = Koefisien Regresi

X1 = Motivasi

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X4 (VC) = Gender

X5 (VC) = Umur

e = Residual

1. Uji Hipotesis
2. Uji Kelayakan Model (uji F)

Uji kelayakan model yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu model atau metode statistik dapat digunakan secara efektif dalam memprediksi atau menjelaskan suatu fenomena atau data serta untuk memahami pengaruh diantara variabel X dengan variabel Y. Tingkat signifikan pada uji f sebesar 5%, untuk mengetahui uji f tersebut yakni “apabila nilai signifikansi f < 0,05 jadi penelitian inidinyatakan layak untuk dilanjutkan, sebaliknya bila nilai signifikan f > 0,05 penelitiannya ini dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan” (Ghozali, 2016;96).

1. Uji Hipotesis Secara Persial (uji t)

Menurut Ghozali (2016;97), uji t umumnya “memperlihatkan besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Uji t dijalankan untuk mengukur perbedaan t hitung dengan t tabel, tingkat signifikannya 2,5%”, penjelasannya meliputi:

1. Jika t hitung > t tabel atau dengan nilai signifikansi < 0,025 maka hipotesisditerima, begitu pula sebaliknya;
2. Apabila t hitung < t tabel atau dengan nilai signifikan > 0,025 maka hipotesis ditolak.
3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi yaitu ukuran statistik dengan menunjukkan seberapa baik variabilitas variabel dependen mampu diuraikan oleh variabel independen pada suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016;95).